

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia sebagai negara berkembang masih menghadapi tantangan dalam mencapai kestabilan ekonomi, salah satunya terlihat dari distribusi pendapatan yang belum merata. Distribusi pendapatan dikatakan merata ketika seluruh lapisan masyarakat bisa menikmati manfaat dari produksi nasional, sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat. Salah satu indikator penting untuk mengukur kesejahteraan adalah rendahnya tingkat ketimpangan pendapatan. Namun, indikator ini sering kali diabaikan dalam membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat serta perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. (Hindun *et al.*, 2019).

ketimpangan distribusi pendapatan merupakan sebuah realita yang ada di tengah-tengah masyarakat dunia baik di negara maju maupun negara berkembang yang juga merupakan isu penting untuk ditinjau dan perlu adanya berbagai upaya dari pemerintah dalam mengambil kebijakan guna meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat, serta peningkatan taraf hidup masyarakat melalui berbagai macam usaha dalam rangka peningkatan distribusi pendapatan dari berbagai macam aspek yang ada (Kalalo *et al.*, 2016). Ketimpangan ini berdampak negatif tidak hanya pada individu dan keluarga, tetapi juga pada masyarakat dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Bahkan negara maju pun sering kesulitan menurunkan ketimpangan, yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan keuangan. Jika ketimpangan pendapatan terus berlanjut akan mengakibatkan berbagai masalah sosial dan ekonomi, seperti peningkatan tingkat kemiskinan, penurunan kualitas

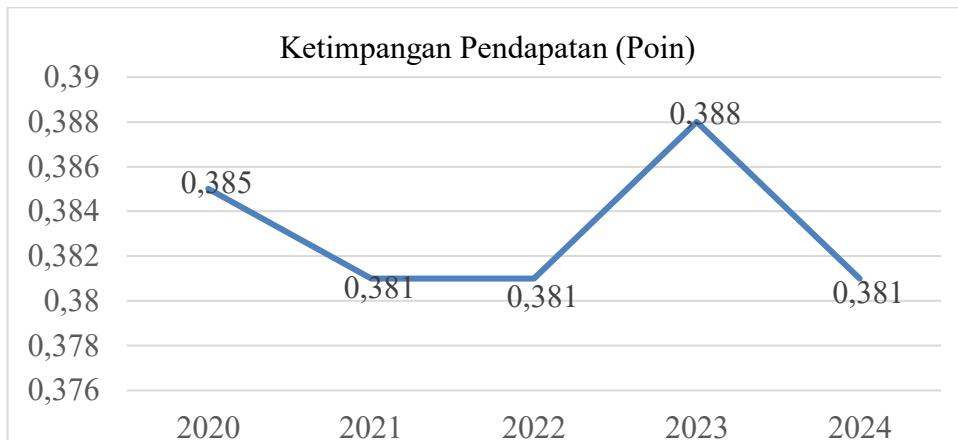
sumber daya manusia, serta terhambatnya upaya mencapai pembangunan yang bersifat inklusif.

Ketimpangan pendapatan merupakan tolak ukur untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana perbedaan kemakmuran, standar hidup, dan pendapatan yang diterima baik oleh individu ataupun rumah tangga di dalam masyarakat dan hal tersebut juga dapat menyebabkan distribusi pendapatan yang tidak merata terjadi disetiap wilayah di Indonesia ((Kasman et al., 2013) Kasman *et al.*, 2013). Pengukuran tinggi rendahnya suatu ketimpangan dapat digunakan melalui indeks gini. Pengukuran tersebut dapat menjelaskan hubungan antara penduduk berpendapatan tinggi dengan penduduk lainnya. Dimana indeks gini memiliki nilai diantara 0 sampai 1. Nilai 0 berarti seluruh masyarakat akan memperoleh pendapatan yang terbagi dengan rata. Sedangkan nilai 1 menggambarkan ketidak setaraan pendapatan dimana pendapatan seluruh distribusi hanya dimiliki seseorang saja. Semakin besarnya nilai indeks gini maka tingkat ketidakmerataan yang terjadi juga semakin tinggi dan jika semakin kecil nilai suatu indeks gini maka ketidakmerataan yang terjadi juga semakin rendah (Sugiarti & Erdkhadifa, 2023).

Selain itu, Ketimpangan pendapatan di Indonesia juga dipengaruhi oleh faktor struktural, seperti keterbatasan akses pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan kerja bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini memperlebar kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin, karena mereka yang memiliki sumber daya lebih mudah memanfaatkan peluang ekonomi, sementara kelompok menengah ke bawah tertinggal. Selain perbedaan pendapatan antarindividu,

ketimpangan juga dipengaruhi oleh ketidakmerataan pembangunan antarwilayah (Yusuf, 2015).

Salah satu penyebab meningkatnya ketimpangan pendapatan adalah perbedaan pengeluaran masyarakat. Setelah pandemi, konsumsi kelompok berpenghasilan tinggi meningkat pesat, sementara kelompok menengah dan bawah cenderung stagnan. Kondisi ini membatasi pertumbuhan ekonomi di daerah dan memperlebar kesenjangan kesejahteraan antarwilayah. Melebarnya ketimpangan menimbulkan perasaan ketidakadilan di kalangan masyarakat, terutama bagi mereka yang merasa terpinggirkan dari manfaat pertumbuhan ekonomi (Aiyar & Ebake, 2020). Adapun perkembangan gini ratio di Indonesia dalam 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:



**Gambar 1.1 Gini Ratio Ketimpangan Pendapatan di Indonesia Tahun**

**2020-2024**

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan Gambar 1.1 menunjukkan perkembangan gini rasio 34 provinsi di Indonesia berfluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2020 hingga tahun 2021 arah trend gini rasio mengalami penurunan dari 0,385 poin hingga 0,381 poin

namun pada tahun 2021 hingga tahun 2022 trend gini rasio stagnan disebabkan ketidakmerataan pertumbuhan ekonomi, inflasi dan kondisi global meskipun begitu ketimpangan pendapatan di Indonesia menunjukkan keadaan dalam periode tersebut meningkat kembali pada tahun 2023 sebesar 0,388 poin disebabkan pada tahun tersebut masih terdampak dari COVID-19 yang masih terasa, membuat pemulihan ekonomi menjadi sulit bagi banyak orang. Pada tahun 2024 mengalami penurunan dari 0,388 poin hingga 0,381 poin.

Dapat diartikan bahwa periode 2020-2024 menurunnya ketimpangan (gap) pendapatan per provinsi, hal ini sejalan dengan pernyataan Febriyani & Anis, (2021) semakin rendah nilai koefisien gini maka akan semakin merata pula tingkat distribusi pendapatannya atau tingkat upah yang diterima. Dalam penelitian yang dilakukan (Pradnyadewi & Purbadharma, 2017) menyimpulkan bahwa korelasi pertumbuhan dan ketimpangan sangat kuat, permulaannya pertumbuhan ekonomi yang hanya terkonsentrasi pada beberapa wilayah saja akan menyebabkan peningkatan ketimpangan yang disebabkan belum meratanya distribusi pendapatan, namun setelah tahapan yang lebih lanjut pemerataan akan semakin tercapai kemudian tingkat ketimpangan akan mengalami penurunan. Salah satu solusi untuk mengentaskan ketidakmerataan pendapatan dengan menaikkan kualitas sumber daya manusia. Daerah dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan memiliki tenaga kerja yang lebih produktif dan mendapatkan gaji yang lebih tinggi, sehingga meningkatkan ketimpangan pendapatan (Putri & Aminda, 2024).

Kondisi ketimpangan pendapatan yang cukup besar terjadi menimbulkan perbedaan pendapatan yang timbul karena adanya perbedaan dalam kepemilikan

sumber daya dan faktor produksi terutama kepemilikan barang modal. Karakteristik suatu wilayah mempunyai pengaruh kuat pada terciptanya pola pembangunan ekonomi. Ketidakmerataan ini berpengaruh pada kemampuan untuk tumbuh yang pada gilirannya mengakibatkan beberapa wilayah mampu tumbuh dengan cepat sementara wilayah lainnya tumbuh lambat. Ketimpangan pendapatan dalam pendistribusianya menyebabkan terjadi kesenjangan antar golongan pendapatan, dimana besar kecilnya pendapatan yang diterima tentu sangat berpengaruh pada pola kehidupan masyarakat. Dengan adanya perbedaan dalam pendistribusian pendapatan, tingkat pendapatan masyarakat akan berbeda-beda pula pengeluaran tiap keluarga, yang pada akhirnya akan berpengaruh pada jumlah pendapatan masing-masing masyarakat sesuai klasifikasi pola mata pencaharian (Hadju *et al.*, 2021).

Pengeluaran pemerintah cenderung untuk mempersempit jurang perbedaan dimana pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia. Pemerintah memiliki peran penting dalam mempercepat pembangunan ekonomi dan mensejahterakan masyarakatnya. Belanja pemerintah yang berkualitas adalah dapat memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi dalam mengurangi ketimpangan (Rizqy *et al.*, 2021). Pemerintah memegang peran penting dalam mengurangi ketimpangan ekonomi dan menjaga stabilitas sosial. Salah satu caranya adalah melalui kebijakan fiskal yang inklusif, seperti pajak progresif dan program redistribusi pendapatan. Dengan pajak progresif, orang berpenghasilan tinggi membayar pajak lebih besar, sehingga ketimpangan pendapatan dapat berkurang. Pendapatan yang diperoleh

dari pajak dapat dialokasikan untuk membiayai program sosial, seperti pendidikan dan layanan kesehatan yang lebih terjangkau bagi masyarakat kurang mampu. Langkah ini pada akhirnya dapat meningkatkan mobilitas sosial dan mengecilkan kesenjangan antargolongan masyarakat (Purbandono, 2024).

Peran kebijakan pemerintah sangat krusial dalam mengurangi ketimpangan ekonomi, tidak hanya untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, tetapi juga untuk menjaga stabilitas sosial yang dapat terancam jika ketimpangan tidak ditangani secara serius. Menurut Purnamasari (2017), kebijakan yang menekankan redistribusi kekayaan, pendidikan, dan jaminan sosial perlu menjadi prioritas untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan harmonis. Kebijakan pemerintah yang tepat dapat membantu menekan ketimpangan ekonomi yang ada. Dalam kebijakan fiskal, pendidikan, dan jaminan sosial, bila diterapkan secara efektif, mampu mengurangi kesenjangan sosial sekaligus memperkuat solidaritas antar kelompok masyarakat. Pemerintah perlu bekerja sungguh-sungguh untuk mengatasi ketidaksetaraan ini agar stabilitas sosial dan ekonomi terjaga dalam jangka panjang. Keberhasilan kebijakan tersebut sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat dan perhatian terhadap kebutuhan mereka, sehingga tercipta sistem yang inklusif dan berkelanjutan (Ningsih & Setyowati, 2022).

Kualitas sumber daya manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti tingkat pendidikan, gaya hidup, lingkungan, dan kesehatan. Kesehatan merupakan kebutuhan yang mendasar untuk pembangunan manusia agar setiap individu dapat melakukan aktivitasnya secara produktif dengan kata lain kesehatan adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi produktivitas individu (Hajebi & Razmi,

2014). Pengeluaran pemerintah dapat digunakan untuk membiayai sektor-sektor publik, seperti sektor pendidikan dan kesehatan (Zulham *et al.*, 2017). Belanja pemerintah dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori berdasarkan fungsi dan tujuannya. Anggaran belanja pemerintah memiliki perannya tersendiri dalam mengurangi distribusi ketimpangan pendapatan dalam mensejahterakan masyarakat yang terjadi di negaranya. Kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan dengan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial, dimana belanja pemerintah tersebut dapat memacu pada kesejahteraan masyarakat.

Menurut Hajebi & Razmi, (2014) mengemukakan bahwa, untuk meningkatkan kesehatan tidak hanya mengandalkan sistem perawatan primer saja tetapi tetap fokus pada kondisi ketimpangan pendapatan, seperti pemerataan distribusi pendapatan yang akan menyebabkan peningkatan taraf hidup penduduk secara besar melalui peningkatan kesehatan, gizi dan pendidikan yang akan menghasilkan peningkatan dalam efisiensi dalam produksi dan meningkatkan motivasi mereka untuk berpartisipasi dalam program ekonomi sosial masyarakat. Dimana kesehatan merupakan salah satu faktor penting dalam sumber daya manusia, yang merupakan modal penting dalam pembangunan suatu bangsa.

Ketimpangan pendapatan dan kesehatan memiliki hubungan satu sama lain, dimana ketika terjadi penurunan ketimpangan pendapatan akan menyebabkan peningkatan pendapatan untuk individu atau rumah tangga, sehingga mampu meningkatkan kesehatan masyarakat yang memberikan konteks yang penting untuk pembangunan ekonomi di suatu negara (Hajebi & Razmi, 2014). Penyediaan layanan kesehatan merupakan tanggung jawab pemerintah melalui pengeluaran

pada fungsi kesehatan. Alokasi anggaran tersebut meliputi peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, dan pencegahan penyakit (Ruslan *et al.*, 2024).

Pengeluaran pemerintah atas pendidikan merupakan investasi pada sumber daya manusia, peran pemerintah melalui kebijakan pengalokasian anggaran bidang pendidikan, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, diharapkan dapat berpengaruh terhadap penurunan ketimpangan pendidikan. Kemampuan masyarakat dalam mengalokasikan pendapatannya untuk pendidikan juga merupakan salah satu faktor menuju pemerataan distribusi pendidikan di suatu daerah. Keluarga dengan jumlah anggota yang banyak serta memiliki pendapatan yang rendah maka akan membatasi ruang gerak para orang tua untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak mereka (Hamzah *et al.*, 2017). Pemerintah dapat menerapkan kebijakan yang menyediakan pendidikan gratis atau bersubsidi bagi keluarga kurang mampu, sekaligus menyesuaikan kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja saat ini yang akan meningkatkan keterampilan tenaga kerja, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

Tingkat pendidikan akan mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka pengetahuan dan keahlian juga akan mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerja. Pada akhirnya seseorang yang memiliki produktivitas yang tinggi akan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik, yang diperlihatkan melalui peningkatan pendapatan maupun konsumsinya. Rendahnya produktivitas kaum miskin dapat

disebabkan oleh rendahnya akses mereka untuk memperoleh pendidikan (Meylina & Nikensari, 2013).

Masyarakat yang memperoleh pendidikan tinggi cenderung memiliki lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan dengan pendapatan yang lebih tinggi. Hal ini berkontribusi pada pengurangan ketimpangan pendapatan karena mereka mampu meningkatkan kualitas hidup mereka secara signifikan. Oleh karena itu, meningkatkan akses dan mutu pendidikan di masyarakat dapat membantu mengurangi ketimpangan pendapatan. Dengan pendidikan yang lebih baik, individu memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mencapai pendapatan yang lebih tinggi, yang pada gilirannya dapat menyebabkan penurunan ketimpangan pendapatan di dalam masyarakat. Dengan demikian, pemahaman dan implementasi strategi untuk meningkatkan pendidikan menjadi kunci dalam upaya mengurangi ketimpangan pendapatan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Darmuji *et al.*, 2024).

Belanja fungsi sosial digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang perlindungan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2012, Belanja bantuan sosial merupakan salah satu jenis pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang disalurkan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, dan melindungi masyarakat dari terjadinya risiko sosial (Ruslan *et al.*, 2024).

Program jaminan sosial yang kuat merupakan unsur penting dalam menekan dampak ketimpangan ekonomi. Melalui penyediaan akses terhadap layanan dasar, seperti kesehatan, perumahan, dan jaminan pengangguran bagi masyarakat miskin, pemerintah dapat mengurangi beban hidup mereka serta mencegah kondisi kemiskinan yang semakin parah. Program-program tersebut memastikan bahwa ketika individu atau keluarga menghadapi kesulitan ekonomi, mereka tetap memperoleh perlindungan yang memungkinkan mereka bertahan dan meningkatkan kualitas hidupnya (Purbandono, 2024). Berikut data perkembangan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, sektor pendidikan dan sektor perlindungan sosial di Indonesia dari tahun 2020 hingga tahun 2024 yang di kutip dari BPS:



**Gambar 1.2 Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Sektor Kesehatan dan Sektor Perlindungan Sosial di Indonesia Tahun 2020-2024 (Triliun Rupiah).**

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, 2025

Berdasarkan Gambar 1.2 menunjukkan trend pengeluaran pemerintah berfluktuasi setiap tahunnya. Pada sektor kesehatan dari tahun 2020 hingga tahun 2022 meningkat dari 61 triliun rupiah hingga 139 triliun rupiah akibat adanya virus covid-19 dimana pemerintah banyak memberikan bantuan kesehatan kepada masyarakat. Sedangkan pada tahun 2023 hingga tahun 2024 stagnan disebabkan perubahan prioritas kebijakan pemerintah dan prioritas anggaran setelah pandemi. Sedangkan pada sektor pendidikan dari tahun 2020 hingga tahun 2024 cenderung mengalami peningkatan dari 156 triliun rupiah hingga 225 triliun rupiah yang berarti bahwa usaha pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yaitu memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan.

Sedangkan pada sektor perlindungan sosial dari tahun 2020 hingga tahun 2024 berfluktuasi setiap tahunnya pada tahun 2020 hingga tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 226 triliun rupiah hingga 260 triliun rupiah yang disebabkan oleh pada tahun tersebut masih terdampak dari masa covid-19 dimana pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat berupa vaksinasi kepada setiap masyarakat, bantuan beras dan lainnya, dan kembali menurun pada tahun 2023 sebesar 241 triliun rupiah disebabkan peralihan prioritas kebijakan pemerintah tetapi meningkat kembali di tahun 2024 sebesar 270 triliun rupiah. Penentuan jumlah pengeluaran pemerintah didasarkan pada prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat yang melalui proses perencanaan dan penganggaran melibatkan unsur pemerintahan setiap daerah (Ruslan *et al.*, 2024).

Sejauh ini banyak penelitian terdahulu yang berkaitan dengan “pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, sektor pendidikan dan sektor perlindungan sosial terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia” seperti penelitian yang dilakukan oleh Prannisa *et al.*, (2023) melakukan penelitian yang berjudul *Government Spending (Economy, Social Protection, Health, Education) on Income Inequality in West Java 2015-2020*, menunjukkan bahwa belanja pemerintah berkontribusi dalam mengurangi ketimpangan pendapatan di Jawa Barat pada tahun 2015-2020. Kemudian penelitian Rindiani *et al.*, (2025) melakukan penelitian dengan judul Peran Pengeluaran Pemerintah Fungsi Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia tahun 2013-2022, menunjukkan bahwa belanja pemerintah pada fungsi pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial memiliki pengaruh signifikan dalam menurunkan tingkat ketimpangan di Indonesia baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Selanjutnya Yasni & Yulianto, (2020) melakukan penelitian yang berjudul Peran Belanja Modal Dan Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Daerah Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia, menunjukkan bahwa belanja modal dan belanja bantuan sosial secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penurunan ketimpangan provinsi di Indonesia tahun 2012-2016.

Penelitian ini mengkaji pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan, sektor pendidikan dan sektor perlindungan sosial terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia melihat bagaimana hubungan alokasi anggaran pemerintah terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia dan memahami bagaimana ketimpangan

pendapatan mempengaruhi berbagai kelompok dalam masyarakat. Serta menjadi langkah awal dalam merumuskan strategi yang tepat untuk mengatasi permasalahan ketidakmerataan distribusi pendapatan demi mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan, diperlukan tindakan nyata dan solusi yang efektif (Taufik *et al.*, 2024).

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik membuat penelitian ini lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Sektor Pendidikan dan Sektor Perlindungan Sosial Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia”**, dengan menggunakan metode regresi linier berganda dan jumlah observasi 20 tahun yaitu dari tahun 2005 hingga tahun 2024.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Seberapa besarkah pengaruh pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia?
2. Seberapa besarkah pengaruh pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia?
3. Seberapa besarkah pengaruh pengeluaran pemerintah pada sektor perlindungan sosial terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia?
4. Seberapa besarkah pengaruh pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan, sektor pendidikan dan sektor perlindungan sosial terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan beberapa hal yang dipaparkan pada rumusan masalah di atas, maka menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.
2. Mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.
3. Mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah pada sektor perlindungan sosial terhadap ketimpangan pendapatan yang terjadi di Indonesia.
4. Mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan, sektor pendidikan dan sektor perlindungan sosial terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta menggali ilmu lebih tentang pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan, sektor pendidikan dan sektor perlindungan sosial terhadap ketimpangan pendapatan yang terjadi di Indonesia.
2. Penelitian ini diharapakan dapat memberikan kontribusi bagi penelitian selanjutnya terkait pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial terhadap ketimpangan pendapatan yang terjadi di Indonesia.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Kepada pemerintah Indonesia, dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk merumuskan kebijakan pengeluaran yang lebih efektif dan efisien, sehingga alokasi anggaran dapat lebih tepat sasaran untuk mengurangi ketimpangan pendapatan di Indonesia.
2. Kepada masyarakat di Indonesia, dengan adanya penelitian ini dapat memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai bagaimana pengeluaran pemerintah dapat berperan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan yang terjadi di masyarakat.